

ASPEK-ASPEK SECURITY DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DI SAMUDRA

INDONESIA

O. Abdul RACHMAN

Pendahuluan

Samudra Indonesia tidak seluas seperti Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Perbedaan lebih menyolok lagi, kalau dibandingkan bahwa baik di Atlantik maupun di Pasifik terdapat negara-negara industri raksasa, sedangkan di sekitar Samudra Indonesia mayoritas negara terdiri dari negara-negara berkembang, yang memproduksi bahan-bahan mentah yang diperlukan oleh negara-negara industri di Atlantik dan di Pasifik. Kebanyakan negara-negara berkembang baru menjadi merdeka pada dekade 1950 dan dekade 1960, sehingga pemerintah-pemerintah negara-negara di sekitar Samudra Indonesia terlibat dalam usaha-usaha pembangunan yang ternyata menghadapi macam-macam persoalan yang menghambat pelaksanaan pembangunan.

Perscalan-persoalan yang menghambat timbul baik karena macam-macam krisis di negara-negara industri, maupun karena kelemahan dan kepekaan yang terdapat dalam konstelasi dalam negeri sendiri.

Ulasan berikut bermaksud membuat beberapa catatan mengenai berbagai persoalan yang banyak bersangkutan dengan aspek-aspek security, dan yang membawa pengaruh pada hubungan internasional dari keadaan Samudra Indonesia dan wilayah-wilayah sekitarnya.

I. Pengertian Istilah Security

Sebagai catatan pertama kiranya baik menyelami paham security itu sendiri, sehingga kita akan dapat memperoleh gambaran mengapa security menjadi salah satu masalah penting di Samudra Indonesia.

Manusia -baik secara individu maupun dalam kelompok, di zaman pra-sejarah maupun seperti sekarang dalam wadah negara

kebangsaan, selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya.

Setiap bangsa mempunyai cita-cita yang luhur dan indah yang ingin dicapainya. Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan cita-cita bangsa untuk zaman abadi dan merupakan landasan idiil untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Usaha untuk mencapai tujuan nasional tadi merupakan strategi nasional, yang dalam pelaksanaannya menemui dan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang semuanya harus ditanggulangi, dengan kekuatan, kemampuan, ketekunan, ketrampilan dan keuletan yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

Tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan merupakan aspek-aspek security yang seyogyanya harus diperhitungkan baik dalam bentuknya, maupun dalam kekuatan yang menimbulkan aspek-aspek security tadi.

Secara universal, security berarti freedom from danger, fear or attack, atau dalam bahasa Indonesia, keamanan berarti bebas dari bahaya, ketakutan atau serangan. Persepsi satu negara mengenai aspek-aspek security berbeda dengan persepsi yang dimiliki oleh negara lain. Hal yang merupakan bahaya untuk satu negara belum tentu dipandang sebagai bahaya oleh negara lain. Dalam rangka hubungan internasional, usaha satu negara untuk mencapai suasana keamanan, usaha untuk dapat hidup bebas dari bahaya, ketakutan dan serangan, dapat menimbulkan perasaan tidak aman pada negara lain yang kemudian juga melakukan usaha untuk meningkatkan keamanannya terhadap negara pertama. Usaha negara kedua untuk meningkatkan keamanannya itu oleh negara pertama dapat ditanggapi sebagai ancaman, sehingga merasa perlu untuk melaksanakan perang terhadap lawannya. Ini adalah kenyataan yang pernah terjadi, dan yang cakerang terjadi pula.

Satu contoh dari sejarah yang belum lama lampau, adalah permusuhan antara Jerman dan Perancis yang tiga kali memuncak dalam bentuk perang, pada tahun 1870, 1914-1918 dan akhirnya antara 1939-1945.

Setelah menderita kekalahan pada tahun 1870, Perancis merasa tidak aman, karena takut bahwa Jerman pada satu hari akan menyerbu kembali. Perasaan tidak aman tadi dibakar dengan penghinnaan yang dirasakan sewaktu Jerman sebagai pihak yang menang menggunakan Istana Versailles, kebanggaan bangsa Perancis, untuk mendikte syarat-syarat perdamaian. Di samping itu Istana Versailles dijadikan tempat untuk memproklamasikan negara kesatuan

Jerman dengan menobatkan Raja Prusia sebagai Kaisar Wilhelm I. Sampai akhir abad XIX kehidupan bangsa Perancis oleh pemerintah-pemerintah yang silih berganti dibina dalam suasana kekalahan. Selalu dianjurkan agar bangsa Perancis tetap waspada terhadap bahaya dari Jerman. Baru pada permulaan abad XX suasana pasif berubah menjadi serangat ofensif. Perubahan kondisi mental dirumuskan oleh ahli filsafat Henri Bergson yang dalam karyanya mengembangkan teori mengenai elan vital, tekad yang tidak kunjung padam, tekad yang dapat mengatasi semua kesulitan yang dihadapi. Bangsa Perancis sadar bahwa kekuatan strategisnya kurang, bila dibandingkan dengan kekuatan Jerman, baik dalam jumlah penduduk, maupun dalam kualitas dan kuantitas produksi industri. Akan tetapi kondisi mental bangsa Perancis yang ingin menghapuskan rasa terhina pada tahun 1870 diperkuat dengan teori Bergson. Dalam bidang strategi militer dirumuskan rencana-rencana operasi untuk mengalahkan Jerman dengan jiwa ofensif, *attaquez - toujours attaquez - serang, serang terus*, demikian diajarkan di sekolah-sekolah militer Perancis. Doktrin militer mencakup pengertian bahwa ofensif tetap harus dilakukan, walaupun dengan pengorbanan unsur manusia yang besar.

Doktrin ofensif Perancis teruji pada pertempuran di Sungai Marne pada tahun 1914. Rencana strategi Perancis untuk membalas dendam terhadap Jerman bertujuan untuk menyerbu ke dalam kerajaan Jerman melalui pegunungan Vogesen langsung ke jurusan Berlin. Rencana strategis Perancis dihadapi oleh rencana strategis Jerman yang bermaksud menyerbu Perancis melalui Belgia dan kemudian melalui tanah datar di bagian Utara Perancis. Markas besar tentara Jerman menyediakan 6 minggu untuk mengalahkan tentara Perancis.

Karena kemampuan komando dan infrastruktur Jerman lebih unggul, maka rencana strategi Jerman dapat mendahului operasi-operasi Perancis. Penyerbuan Jerman dalam waktu singkat sudah sampai di Sungai Marne, yakni garis pertahanan Perancis yang hanya terletak beberapa kilometer dari kota Paris. Jendral-jendral Jerman sudah hidup dalam suasana kemenangan. Namun pasukan-pasukan Perancis dengan gigih tetap melakukan serangan-serangan ofensif terhadap tentara-tentara Jerman. Banyak sekali kesatuan-kesatuan Perancis dihancurkan oleh artileri dan tembakan-tembakan Jerman. Tiap kali markas besar Perancis mengiriskan kesatuan-kesatuan lain. Akhirnya serangan Jerman dapat dihentikan. Perang Dunia I berlangsung empat tahun, jauh lebih lama daripada waktu enam minggu yang direncanakan oleh markas besar Jerman. Kekalahan Jerman pada tahun 1918 sebenarnya sudah mulai pada tahun 1914 di pertempuran di Sungai Marne.

Kekalahan Jerman pada tahun 1918 menimbulkan kondisi mental bangsa Perancis yang pasif. Dalam bidang strategi militer pembentukan Garis Maginot, rangkaian benteng-benteng di perbatasan Timur dipandang cukup untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan serangan dari Jerman. Dalam kehidupan masyarakat makin timbul mentalitas masa bodoh di kalangan rakyat banyak, yang disebabkan karena perpecahan dan pertentangan antara partai-partai politik, sehingga semangat elan vital tidak terdapat lagi di Perancis.

Sebaliknya bangsa Jerman yang hidup dalam mentalitas kalah dan perasaan hina, oleh Hitler beserta Partai Nasional-Sosialis diorganisir sebagai satu kesatuan tekad untuk dapat membalas dendam terhadap Perancis. Dalam usaha untuk mencapai dan meningkatkan kesadaran bangsa Jerman maka digali teori-teori dari ahli-ahli filsafat Jerman seperti Schopenhauer, Hegel dan Nietzsche untuk memupuk harga diri bangsa Jerman sebagai Ras Aria yang berhak mempertuan seluruh dunia. Pelaksanaan teori-teori Ras tadi, menimbulkan reaksi di seluruh dunia. Perang Dunia I hanya langsung melibatkan negara-negara Jerman, Austro-Hongaria pada satu pihak dan Perancis, Inggris, Rusia dan Amerika Serikat pada lain pihak. Perang Dunia II melibatkan seluruh dunia. Akibat Perang Dunia II di benua Eropa terjadi pembagian Jerman yang menjadi Republik Federasi Jerman dan Republik Demokrasi Jerman. Permusuhan antara Perancis dan Jerman yang selama 80 tahun mengganggu kestabilan benua Eropa dan di seluruh dunia berakhir, dan digantikan dengan perang dingin antara dunia bebas dan dunia komunis. Contoh hubungan Perancis-Jerman digantikan dengan pola superpowers, yang misahnya sampai ke masalah Samudra Indonesia.

Di Eropa dan di Samudra Atlantik didirikan NATO sebagai persekutuan strategis militer negara-negara Barat untuk menghadapi ancaman yang dirasakan karena ekspansi blok komunis yang tersusun dalam Pakta Warsawa.

Dalam rangka NATO Amerika Serikat memberikan bantuan untuk membangun kekuatan-kekuatan strategis negara-negara Eropa Barat yang harus dibangun dari kehancuran yang diderita selama Perang Dunia II. Walaupun titik berat NATO diletakkan pada segi strategis militer, namun bantuan Amerika Serikat memungkinkannya negara-negara Eropa Barat bangun kembali terutama dalam segi perekonomian. Walaupun masih berlaku ikatan NATO dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan rakasa, pada permulaan dekade 1960-an dibentuk Masyarakat Besi dan Baja - Coal and Steel Community yang diprakarsai oleh pemimpin-pemimpin dari Jerman dan Perancis. Coal and Steel Community ini kemudian diperluas menjadi Pasaran Bersama Eropa -

European Economic Community, dan berkembang menjadi kesatuan ekonomi yang makin lepas dari dominasi Amerika Serikat.

Paralel dengan perkembangan di Eropa Barat, maka di Eropa Timur didirikan COECCO, persekutuan di bidang ekonomi dari negara-negara Eropa Timur. Perkembangan COECCO di bidang ekonomi pesat sekali, walaupun belum mencapai tingkatan dari PEE. Peningkatan hidup bangsa-bangsa di benua Eropa, baik di Barat maupun di Timur, mengalihkan fokus kondisi mental bangsa-bangsa Eropa dari aspek-aspek security yang tadinya dominant, ke arah perkembangan ekonomi masing-masing negara.

Kedua superpowers Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mencapaiimbangan strategis di benua Eropa. Di bidang konvensionalimbangan strategis berupa workable deterrent, setelah kedua superpowers berkali-kali mengadakan challenge and response, walaupun masih pada tingkat demonstrasi dengan kekuatan nuklir strategis, nuklir taktis dan dengan kekuatan militer konvensional. Di Samudra Indonesia belum tercapaiimbangan antara kedua superpowers, justruimbangan kedua superpowers itu sedang berada di dalam proses pembentukan.

II. Sistem Senjata Teknologi dan Sosial

Dalam hubungan internasional dipergunakan kekuatan nuklir, konvensional dan kekuatan non-konvensional, dalam pengertian gerilya sampai dengan terror yang belakangan ini dipergunakan dalam operasi hy-jacking kapal-kapal terbang.

Kekuatan nuklir sedianya hanya dimiliki oleh anggota-anggota klub nuklir yang terdiri dari Amerika Serikat, Soviet, Inggris, Perancis dan RRC. Dipertkirakan bahwa pada dekade 1970-an RRC akan menguasai delivery system - sistem penembakan untuk IRBM. Dalam lingkungan klub nuklir terdapatimbangan antara Amerika Serikat beserta Inggris dan Perancis pada satu pihak, Soviet pada pihak kedua dan RRC sebagai pihak ketiga. Kapasitas Amerika dan Soviet jauh melebihi kapasitas Inggris, Perancis dan RRC. Kapasitas nuklir Inggris dan Perancis dipandang sebagai belengkap kapasitas Amerika, akan tetapi kapasitas dan kemampuan RRC timbul sebagai penggancangimbangan terror yang berlaku antara kedua superpowers.

Tiba-tiba pada bulan Mei 1974 India melodahkan kekuatan nuklir sebesar 10 kiloton, yang telah menimbulkan reaksi keras, terutama pada tetangganya Pakistan. Di samping itu terdapat

perlombaan antara Amerika dan Perancis untuk melengkapi Israel dan Mesir dengan tenaga nuklir. Iran akan mengembangkan tenaga nuklir dengan reaktor-reaktor Perancis. Kemampuan untuk mengembangkan tenaga nuklir, yang segera dapat dirubah menjadi alat perang, sebenarnya dimiliki oleh negara-negara industri, seperti Jepang, Israel, dan mungkin Afrika Selatan.

Kekhawatiran timbul bahwa bom nuklir kecil, yang ternyata relatif mudah dapat diproduksi, dapat dipergunakan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan terror.

Dalam bidang perang konvensional, maka detente di benua Eropa, menghasilkan perlombaan antara produsen-produsen persenjataan konvensional untuk menjual barang-barangnya ke wilayah-wilayah di luar Eropa. Industri persenjataan merupakan komponen ekonomi yang sangat berharga bagi perekonomian negara yang mempunyai industri persenjataan. Pertimbangan ekonomi terutama, menghasilkan penjualan senjata oleh Perancis dan Inggris kepada Afrika Selatan, walaupun Afrika Selatan sejak 1963 oleh PBB telah dikutuk karena politik rasialistisnya. Penjualan kapal terbang Mirage kepada Libya, juga oleh Perancis, menggoncangkanimbangan kekuatan yang ada antara pihak Israel dan Arab,imbangan mana dipelihara oleh Amerika dan Soviet. Kenaikan harga-harga minyak telah menimbulkan keinginan negara-negara Arab di seluruh Perseja untuk membeli senjata-senjata modern. Teknisi untuk persenjataan modern diperlengkapi oleh Pakistan.

Perang konvensional di negara-negara berkembang masih juga terjadi, misalnya di Nigeria untuk menumpas gerakan separatisme Biafra. Divisi-divisi di bawah Jendral Gowon dari pemerintah pusat Nigeria menghadapi dan bertempur dengan divisi-divisi Biafra di bawah Jendral Yakubu, sesuai dengan ajaran-ajaran taktik yang pernah dipelajari dari buku-buku taktik di sekolah-sekolah militer Inggris. Perang antara Israel dan Arab memperlihatkan keadaan sama. Sepitupun halnya dengan perang antara India dan Pakistan, baik pada tahun 1965 di Bann of Dush, maupun pada tahun 1971 waktu divisi-divisi India mengalahkan divisi-divisi Pakistan di Pakistan Timur yang kemudian menjadi Bangladesh. Perlu dicatat juga bahwa pada tahun 1962 perang antara RRC dan India, juga dapat digolongkan dalam kategori perang konvensional yang dipergunakan oleh kedua belah pihak dalam hubungan internasionalnya.

Sejak dulu perang gerilya sudah dikenal. Kata gerilya dipergunakan pertama kali di Spanyol, waktu rakyat Spanyol dalam rombongan-rombongan kecil menyerang, menghadang dan kadang-kadang

dapat menghancurkan pasukan-pasukan Napoleon. Juga di bagian-bagian lain di dunia pernah diadakan perang gerilya, perang non-konvensional. Akan tetapi baru dengan periode kemerdekaan negara-negara berkerbang di Asia dan Afrika, perang gerilya dikembangkan menjadi senjata yang dipergunakan oleh pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat. Perjuangan gerilya, seperti terjadi di Burma, di Indonesia, di Vietnam dan sekarang di daerah yang pernah dikuasai Portugal, seperti di Guinea-Bissau, dan Mozambik, mencapai sukses karena:

- ada pimpinan yang dapat menggalang persatuan dan kesatuan antara semua golongan masyarakat selama berlangsung perjuangan kemerdekaan, sehingga motivasi perjuangan dihadapi sebagai kebulatan tekad bangsa terhadap penjajah.
- dalam organisasi gerilya dari pimpinan pusat melalui saluran-saluran komando kepada tingkat bawah, karena menghadapi kekurangan-kekurangan di segala bidang, maka cara-cara perang gerilya baik di bidang persenjataan maupun di bidang sosial dan sosial menghasilkan inovasi bukan saja dalam pelaksanaan bahkan juga dalam pengembangan pengetahuan dan pengertian mengenai istilah strategi.

Pengelolaan dalam penggunaan senjata pada tingkat nuklir, konvensional dan gerilya dapat ditambah dengan peperangan antara kekuatan yang berkapasitas nuklir dan konvensional yang besar sekali yang menghadapi kekuatan gerilya yang terutama didorong oleh motivasi yang kuat. Perang Vietnam menggambarkan bahwa Amerika Serikat dengan kapasitas persenjataan rakasa tidak dapat mengalahkan Vietnam Utara, Vietkong yang kapasitasnya jauh lebih rendah. Bantuan Amerika Serikat kepada Republik Vietnam Selatan jauh melebihi bantuan yang diterima oleh Vietnam Utara dan Vietkong dari Uni Soviet dan RRC.

Situasi tersebut di atas ikut memberi warna kepada Samudra Indonesia. Detente yang berlaku antara kedua superpowers di benua Eropa tidak berlaku di kawasan Samudra Indonesia. Waktu perang dingin sedang menghebat pada dekade 1950-an, maka Amerika Serikat sebagai pusat dunia bebas menyusun beberapa pakta-pakta militer untuk membendung ekspansi komunis. Di samping pembentukan NATO di benua Eropa, maka di Samudra Indonesia disusun SEATO untuk Asia Tenggara, Bagdad pact yang kemudian menjadi CENTO di Timur Tengah. Untuk memantapkan koordinasi antara semua pakta-pakta militer disusun jaringan telekomunikasi melalui beberapa station telekomunikasi di beberapa tempat-tempat strategis

seperti di Asmara (Ethiopia), Diego Garcia, Kepulauan Cocos, Pulau Sam dan fasilitas-fasilitas telekomunikasi di Australia bagian Barat.

Sekalinya Uni Soviet tidak berhasil menyusun pakta pertamanan di kawasan Samudra Indonesia. Usaha Soviet lebih ditonjolkan pada segi-segi non-militer, seperti dalam bidang kebudayaan, diplomasi dan bantuan ekonomi. Terdapat perjanjian-perjanjian bilateral antara Soviet dengan negara-negara komunis di Asia, seperti RRC, Mongolia, Korea Utara dan Vietnam Utara.

Pada umumnya negara-negara berkembang di sekitar Samudra Indonesia tidak menyetujui konsepsi security dari Amerika Serikat maupun pendekatan-pendekatan Soviet yang menggunakan segi-segi non militer akan tetapi pada hakekatnya masih merupakan lanjutan dari perang dingin. Posisi dan jawaban negara-negara berkembang ini dirumuskan dalam konperensi Asia Afrika di Bandung dan kemudian pada konperensi-konperensi non-aligned di Belgrado dan di Kairo pada tahun 1960 dan 1961. Semua ini masih merupakan latar belakang dari pihak-pihak tersebut di dalam kebijaksanaan masing-masing mengenai kedudukan Samudra Indonesia.

III. Sejarah

Baik juga membuat sedikit penelitian historis tentang Samudra Indonesia ini. Sejarah menceritakan bahwa Samudra Indonesia sejak dahulu merupakan sarana perhubungan antara negara-negara sekitar Samudra Indonesia dan dengan kerajaan Cina. Perdagangan dengan kapal-kapal berlaku antara pelabuhan Canton melalui Selat Malaka dengan pelabuhan-pelabuhan yang terletak di kepulauan Indonesia, di Semenanjung India, di Teluk Persia, di Laut Merah dan di pantai Timur Afrika. Bahwa perdagangan antara bangsa-bangsa Asia pada waktu itu juga mempergunakan kekerasan senjata dapat dibuktikan bahwa pelabuhan Canton pada tahun 758 dihancurkan oleh armada Arab.

Kehadiran kapal-kapal Cina (RRC) yang sekarang menimbulkan kekuatiran di negara-negara anti komunis, sebenarnya tidak merupakan barang baru di kawasan Samudra Indonesia.

Dinasti Sung Selatan dari 1127 sampai 1279 mengirimkan armada-armada ke arah Selatan melalui Selat Malaka ke Samudra Indonesia. Dinasti Yuan 1279 - 1368 yang terkenal karena Kaisar Kublai Khan mengirimkan armada-armadanya untuk meminta upeti

dari raja-raja di luar perbatasan kerajaan Cina. Pada tahun 1281 dikirim ekspedisi ke Jepang; pada tahun 1282 dan 1287 ekspedisi dikirim ke Champa dan ke Anam. Pada 1292 armada Cina menghadap kepada Raja Majapahit dan menuntut agar Raja Majapahit untuk menyatakan kesetiannya. Pujangga sejarah Cina menceritakan bahwa Raja Majapahit menolak tuntutan Cina, bahkan Duta Cina dipotong hidungnya oleh penguasa-penguasa Majapahit. Penghinaan terhadap Duta Cina menimbulkan amarah Kublai Khan yang memutuskan untuk mengirimkan ekspedisi ke pulau Jawa untuk "mengajar" Raja Majapahit. Kegagalan misi diplomatik diikuti dengan kegagalan ekspedisi militer.

Dinasti Ming 1369 - 1433 merupakan puncak ekspansi Cina di Samudra Indonesia. Sejak tahun 1405 sampai dengan 1433 tujuh armada dikirim untuk menuntut upeti dari Raja-raja di kawasan Indonesia dan Samudra Indonesia. Tempat-tempat yang dikunjungi terletak di pulau Jawa, kepulauan Maladive, Kalikut, Sri Langka, Ormuz di Teluk Persia, Aden dan Mogadishu di Laut Merah dan Malindi, Kilwa dan Barawa di pantai Afrika Timur¹.

Kehadiran armada-armada Cina di kawasan Indonesia dan di Samudra Indonesia membawa dampak besar pada stabilitas negara-negara pada waktu itu. Diceritakan bahwa Raja Malaka yang menguasai lalu lintas pelayaran di Selat Malaka datang di Peking untuk minta perlindungan karena takut terhadap kerajaan Thai di Utara dan kerajaan Demak di Selatan. Malaka diberi perlindungan dan dapat berkembang menjadi pelabuhan transit dari perdagangan antara kerajaan Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di sekitar Samudra Indonesia. Peranan Malaka dapat bertahan sampai 1511 waktu Malaka diduduki oleh Portugal.

Setelah tahun 1433 kerajaan Cina mengisolir diri dan sejak itu lenyaplah kehadiran armada-armada Cina. Pujangga-pujangga sejarah kerajaan Cina selalu mencatat jumlah kapal dan orang yang diberangkatkan pada ekspedisi-ekspedisi berturut-turut. Misalnya ekspedisi pertama dari dinasti Ming terdiri dari 63 kapal dengan 27.800 orang. Ekspedisi ketiga terdiri dari 48 kapal dengan 30.000 orang. Ekspedisi-ekspedisi Kublai Khan sebelumnya juga mengirimkan ekspedisi-ekspedisi besar seperti terjadi waktu dinasti Ming. Walaupun kapal-kapal Cina sudah

¹ Auguste Toussaint - *Histoire de l'Océan Indien*, hal. 76 berikut Presses Universitaires de France 1961.

mempgunakan kompas, namun dapat diperkirakan bahwa armada-armada besar Cina menderita kerugian-kerugian karena badai-badai tropis yang dahsyat, karena pertempuran seperti terjadi di pulau Jawa pada tahun 1392 atau mungkin karena penyakit-penyakit. Sejak akhir abad XIII sudah tercatat ada perkampungan-perkampungan Cina misalnya di Kalimantan bagian Barat, di sungai Musi yang kemudian menjadi sarang bajak laut. Baru pada tahun 1405 laksamana bajak laut Cina di Palembang ditangkap oleh armada dinasti Ming yang membawa "laksamana" ke Peking untuk dipenggal. Penduduk-penduduk Cina memperisterikan wanita-wanita setempat.

Periode Cina berakhir dan pada permulaan abad XVI mulai periode penjajahan dari Barat, sampai pertengahan abad XX.

Armada-armada Cina terutama bertugas untuk meyakinkan raja-raja di Selatan dan di sekitar Samudra Indonesia tentang kebesaran singgasana, semacam politik merca suar, karenanya tidak pernah dimaksudkan untuk menetap di satu tempat.

Berlainan sekali peranan Barat. Tujuan utama armada-armada Barat adalah untuk mencari komoditi-komoditi yang diperlukan untuk masyarakat-masyarakat di benua Eropa. Portugal sebagai bangsa Eropa pertama yang datang di perairan Samudra Indonesia, dapat mempertahankan hegemoni dan dominasi dari tahun 1500, waktu Albuquerque menjadi Gubernur Jendral pertama sampai permulaan abad XVII, waktu Belanda dan Inggris mulai mendesak Portugal. Strategi maritim Portugal yang dirumuskan oleh Albuquerque, mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menentukan satu tempat strategis untuk dijadikan pusat kekuasaan Portugal. Untuk ini dipilih Goa di semenanjung India.
- b. Pembentukan benteng-benteng atau sitadel-sitadel di semua tempat-tempat strategis untuk menjaga lancarnya perdagangan.
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja atau syah-bandar setempat demi kepentingan dagang.

Baik Belanda dan kemudian Inggris pada permulaan mengikuti pola strategis maritim Portugal. Belanda mula-mulanya memilih Banten sebagai pusat kekuasaannya, kemudian pindah ke Jakarta yang selanjutnya disebut Batavia. Inggris memilih Bombay sebagai pusat pemerintahannya. Rangkaian benteng-benteng atau sitadel yang didirikan pada permulaannya tidak ditujukan terhadap ancaman-ancaman dari raja-raja setempat, bahkan benteng-benteng yang merupakan kantor dagang yang diperkuat didirikan untuk

menghadapi usaha-usaha dari kekuatan-kekuatan Barat yang dalam saingan juga ingin berdagang di wilayah yang sama.

Setelah Portugal lenyap dari sebagian besar wilayah Samudra, dan hanya tinggal di Mozambique, Goa, Macao dan Timor Dilly, maka kekuasaan Belanda dan Inggris yang tadinya hanya di beberapa tempat saja, meluas menjadi jajahan-jajahan besar.

Masih menjadi pertanyaan bagaimana armada-armada kecil dari Eropa dapat menghadapi kerajaan-kerajaan sepanjang pantai dan berhasil mengembangkan kekuasaannya sampai menjadi daerah jajahan yang luas.

Ada yang mengatakan bahwa kapal-kapal dari Eropa lebih unggul dalam pertempuran-pertempuran di laut karena mempunyai sistem layar yang dapat memanfaatkan angin, walaupun angin datang dari jurusan yang berlawanan. Selanjutnya kapal-kapal Eropa dipersenjatai dengan meriam-meriam yang dapat menembak pada jarak jauh.

Ada yang mencari jawaban terhadap pertanyaan tadi di bidang sosial budaya. Armada-armada Eropa, karena mula-mulanya datang untuk berdagang, oleh raja-raja atau syahbandar setempat diterima sebagai pedagang di antara pedagang-pedagang Asia lainnya. Akan tetapi dengan ketrampilan dagang dan ketrampilan diplomasi yang ditulis dalam perjanjian-perjanjian dengan penguasa-penguasa setempat, yang di antaranya selalu mencakup pasal bahwa pihak pedagang Eropa akan memberi bantuan kepada pihak kerajaan terhadap lawannya memperkuat posisi pedagang-pedagang Eropa. Faktor "bantuan" kepada raja setempat terutama oleh Belanda dan Inggris ditangani dengan sukses, sehingga akhirnya Belanda dan Inggris di wilayah jajahan masing-masing bertindak sebagai wasit yang bersenjata kalau terjadi pertentangan antara satu raja dengan raja lain, bahkan bila terjadi pertentangan di dalam kerajaan mengenai perebutan mahkota antara fraksi-fraksi bangsawan di dalam kerajaan itu.

Bantuan yang diberikan oleh Belanda dan Inggris selalu dibayar dengan konsesi-konsesi yang memperbesar kekuatan, kekuasaan Belanda dan Inggris dan mengocilkan, mengurangi kekuatan dan kekuasaan raja-raja di Asia.

Periode penguasaan Eropa Barat terhadap kawasan Samudra Indonesia sejak semula sampai akhir zaman penjajahan pada pertengahan abad XX ditandai dengan mencari dan memperoleh komoditi-komoditi yang diperlukan untuk perkembangan masyarakat di Eropa.

Mula-mulanya usaha dagang dipusatkan pada perdagangan rempah-rempah. Kemudian dengan terjadinya revolusi industri pada abad XIX maka komoditi yang diperlukan adalah hasil perkebunan seperti karet, sisal, kopi dan hasil kehutanan. Demikianlah maka kawasan-kawasan di sekitar Samudra Indonesia secara historis sudah selalu terlibat di dalam arus kekuatan-kekuatan.

IV. Komoditi-komoditi

Baiklah membuat sedikit gambaran tentang komoditi-komoditi di negara-negara di kawasan Samudra Indonesia. Rempah-rempah, terutama cengkeh yang pernah menjadi komoditi utama dalam perdagangan di Eropa, pada waktu sekarang tidak menempati posisi kuat lagi. Bahkan cengkeh, yang berasal dari Maluku, sekarang sudah disebarkan ke wilayah-wilayah lain. Misalnya di Zanzibar dan di Madagaskar, lepas pantai timur Afrika, cengkeh menjadi komoditi ekspor dan penghasil devisa, karena cengkeh diimpor ke Indonesia.

Di sekitar Samudra diproduksi karet, terutama di Sri Lanka, Kuangthai, Malaysia dan Indonesia. Lebih dari 90% perdagangan karet alam berasal dari empat negara tadi. Walaupun di samping karet alam diproduksi karet sintetis, namun kebutuhan akan karet alam masih menguntungkan negara-negara produsen karet alam.

Jute, kenaf dan abaca yang diproduksi di India, Bangladesh dan Thailand dapat juga bertahan harga. Akan tetapi cotton dan wol mengalami penurunan harga, yang sangat mempengaruhi ekonomi India, dan Mesir.

Pupuk melonjak harganya, karena melonjaknya harga minyak bumi, ditambah dengan meningkat kebutuhan akan pupuk. Walaupun begitu FAC di Roma mengumumkan bahwa negara berkembang yang terdiri dari 70% penduduk dunia, hanya memakai 15% dari keperluan pupuk sedunia. Diperkirakan bahwa diperlukan 30.000 juta dollar untuk diinjeksikan di produksi pupuk agar dapat menjamin kebutuhan dunia akan makanan.

Beras, walaupun Asia dari dulu merupakan produsen beras, namun eksplosif penduduk, ditambah dengan gangguan keamanan di beberapa negara, telah menjadi sebab-sebab negara-negara berkembang perlu mengimpor beras dari Amerika Serikat dan Canada. Harga beras pada tahun 1973 dan 1974 melonjak tinggi.

Hasil pertambangan antara lain biji besi di Australia dan Vietnam Utara, Batu bara di Australia, India dan BRU. Timah di Indonesia, Malaysia, Muangthai dan Australia. Nikel di Australia dan Indonesia. Hasil kehutanan berupa kayu, terdapat di Filipina, Malaysia dan Indonesia. Harga-harga tinggi yang tercapai pada tahun 1973 sangat menurun pada tahun 1974. Minyak bumi, terutama diketemukan di Timur Tengah dan di Asia Tenggara. Walaupun minyak juga terdapat di Amerika Latin, di Amerika Utara, di Afrika Barat dan di Afrika Utara, namun produksi minyak di Timur Tengah beserta cadangan jauh melebihi produksi sumber-sumber lain. Walaupun kenaikan harga minyak ditangani oleh OPEC, namun ternyata bahwa negara-negara produsen - bukan anggota OPEC, turut menaikkan harga minyaknya, seperti misalnya Soviet, Amerika Serikat dan Canada. Dipkirakan bahwa konsumsi minyak bumi dalam 10 tahun mendatang akan meningkat dua kali. Pun pula diperkirakan bahwa Amerika Serikat dalam jangka waktu itu akan meningkatkan impor dari Teluk Persia, karena produksi di benua Amerika - termasuk produksi di Alaska tidak dapat ditingkatkan.

Kenaikan harga minyak oleh OPEC menonjolkan interdependensi dunia dalam rangka ketergantungan negara-negara industri dari sumber-sumber minyak, lebih lagi karena kebutuhan akan minyak akan naik dua kali dalam 10 tahun yang akan datang.

Hasil gemilang OPEC merupakan dorongan untuk negara-negara berkembang agar dengan bahan-bahan mentah lain juga dapat tercapai persatuan antara produsen-produsen bahan-bahan mentah supaya bersama-sama menghadapi para konsumen.

Sudah jelas bahwa negara-negara berkembang akan melanjutkan usahanya untuk dapat mencapai harga-harga lebih tinggi untuk hasil-hasil produksinya, namun kesatuan telad negara-negara berkembang sulit tercapai, karena perhitungan masing-masing negara masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berlainan dan berbeda-beda. Yang perlu kita catat adalah bahwa masalah komoditi ternyata telah melahirkan pola pertoruan kekuatan-kekuatan di wilayah sekitar Samudra Indonesia. Untuk segi security kenyataan itu perlu dipertimbangkan.

V. Eksplosi Penduduk, Makanan dan Masalah Energi

Di sekitar Samudra Indonesia terletak negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. India dengan 500 juta, Indonesia 130 juta, Pakistan lebih kurang 50 juta, Bangladesh 30 juta. Ditambah dengan jumlah penduduk negara-negara lain di sekitar Samudra, maka jumlah penduduk melebihi 300 juta manusia. Terkecuali Afrika Selatan, Australia dan mungkin Iran, negara-negara lain semua merupakan negara berkembang, yang semuanya menghadapi dua persoalan besar, yaitu bertambahnya penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan makanan.

Persoalan penduduk dan makanan merupakan persoalan yang cukup gawat, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1974 mengadakan UN Population Conference di Bukares pada bulan Agustus dan UN World Food Conference di Roma pada bulan Nopember. Walaupun kedua konferensi dihadiri oleh delegasi-delegasi dari segenap penjuru dunia, namun kedua konferensi lebih menonjolkan perdebatan-perdebatan politik sehingga tidak tercapai konsensus mengenai penyelesaian yang diperlukan.

Sedangkan angka-angka statistik yang dikumpulkan oleh PBB, mendesak sekali agar diketemukan penyelesaian mengenai masalah penduduk dunia dan kebutuhan akan makanan. Sekarang saja, tiap Minggu ada 10.000 orang mati kelaparan. Tiap hari jumlah penduduk bertambah dengan 200.000 jiwa, artinya tiap tahun ada tambahan 75 juta. Diperhitungkan bahwa pada tahun 2000 penduduk dunia akan berjumlah 7.000 juta manusia. Untuk benua Asia diperhitungkan bahwa pada tahun 2000 penduduknya berjumlah lebih dari 4.000 juta, lebih kurang dua pertiga dari jumlah penduduk dunia, Indonesia pada tahun itu akan mempunyai 250 juta.

Kira-kira sepuluh tahun yang lalu, negara-negara berkembang di Asia, yang tidak termasuk blok komunis, mengharapkan bahwa "revolusi hijau" dengan bibit unggul padi akan menghasilkan panen yang lebih besar. Akan tetapi, karena melonjaknya harga minyak bumi, dengan sendirinya melonjak juga harga pupuk yang diperlukan untuk bibit unggul tadi. Tambah lagi dengan bencana-bencana alam yang telah menimpa Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia dan Filipina, yang menghancurkan panen dan mengacaukan rencana-rencana pembangunan, karena belum dapat diperhitungkan akan ada bencana alam serta akibat-akibatnya. Pada World

Population Conference di Bukares, Agustus 1974, diperbincangkan "basic demographic problems, their inter-relationship with economic and social development, and the population policies and action programmes needed to promote human welfare and development".

Konsep-konsep konferensi mendapat tantangan dari delegasi-delegasi Afrika dan Amerika Selatan, dari Vatikan, dari RRC dan dari beberapa negara sosialis. Berkata delegasi RRC antara lain: "We have learned from our own experience that it is wrong and far from the truth to say that over-population is the main cause of the poverty and backwardness of developing countries ... and that a population policy is decisive in solving the problem of poverty and backwardness". Perdebatan sengit hampir menimbulkan deadlock, sehingga konferensi hanya menghasilkan resolusi lunak.

Konferensi berikutnya di Roma, adalah United Nations World Food Conference, yang sebenarnya merupakan pelengkap dari World Population Conference di Bukares. Kurang berhasilnya konferensi Bukares merupakan pertanda bahwa konferensi di Roma kurang memuaskan akhirnya.

Kebanyakan negara-negara berkembang mencari penyelesaian dengan mendesak negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat dan Kanada, untuk melanjutkan dan meningkatkan peranannya sebagai negara pemberi bantuan. Berkata antara lain wakil India: "the problem could be solved if the rich would allocate to the poor larger proportions of their wealth".

Ada juga diperbincangkan di Roma, agar dibuat semacam "food-box", yang dapat menjadi tempat pengumpulan makanan dari negara-negara kaya untuk kepentingan negara-negara miskin. Namun konferensi Roma tidak membawa "jawaban" yang dicari untuk persoalan-persoalan yang dihadapi negara-negara miskin.

Bahkan, ada beberapa teknokrat, ahli-ahli ekonomi, mulai memperbincangkan "triage solution" terhadap negara-negara miskin. Menurut Webster Dictionary, triage berarti sorting out - memilih. Hal ini pernah ditangani waktu Perang Dunia I, di Perancis. Karena begitu banyak korban, maka di rumah-rumah sakit militer Perancis, diadakan pilihan antara golongan yang luka ringan, golongan yang luka parah dan golongan yang lukanya masih dapat diobati. Golongan yang luka ringan tidak diobati lagi, karena diperhitungkan akan sembuh sendiri. Mereka yang luka parahpun tidak diobati karena tak akan mati. Hanya mereka yang luka-lukanya masih dapat diobati diberi perawatan.

Mungkin para teknokrat sudah merasa putus asa, karena semua "paper-paper" yang dipersiapkan tidak dapat dilaksanakan karena tantangan-tantangan politis, seperti ternyata dalam perdebatan-perdebatan sengit, baik di Bukares, maupun di Roma, mungkin juga, karena statistik-statistik demografi memang menghancurkan optimisme yang diperlukan. Ambillah kasus India. Bila India melanjutkan tambahan penduduk dengan 2,5% setahun, maka pada tahun 2000, penduduk India akan lebih besar jumlahnya daripada penduduk PBB. Untuk memberikan pendidikan, perumahan dan perawatan medis, maka - menurut ukuran-ukuran PBB, tiap hari selama 25 tahun harus dibangun 1.000 ruangan sekolah baru, 1.000 ruangan rumah sakit dan 10.000 rumah. Ditambah dengan kebutuhan makanan yang ditentukan sebanyak 100 kg beras atau gandum per kapita¹. Uraian ini sekedar untuk memberi gambaran bahwa masalah penduduk dan masalah pangan akan merupakan faktor determinan di dalam soal security bagi negara-negara di sekitar Samudra Indonesia itu.

Semua negara-negara berkembang menghadapi persoalan yang sama, yalah bagaimana mencapai imbang antara tambahan penduduk yang pesat pada satu pihak dengan menyingkatkan GNP. Di beberapa negara tercapai growth sebanyak 5%, akan tetapi bila dikurangi dengan tambahan penduduk sebanyak 3%, maka real growth hanya sampai 2% setahun.

Melonjaknya harga minyak bumi menimbulkan situasi baru dalam dunia ekonomi internasional dan sebagai akibatnya situasi politik internasional merubah pandangan yang pernah menggolongkan negara-negara dunia dalam golongan kaya, maju dan golongan negara-negara berkembang. Bechtoldt² berpendapat bahwa situasi baru harus diukur dengan nilai apakah sesuatu negara mempunyai cukup keuangan untuk membiayai supply energi atas dasar efisiensi di bidang ekonomi. Dengan mempergunakan ukuran nilai tadi maka negara-negara industri juga terbagi dalam dua golongan. Amerika Serikat, karena sampai sekarang belum tergantung sepenuhnya pada impor minyak bumi dan Republik Federasi Jerman karena mempunyai surplus ekspor yang besar sekali, merupakan dua negara industri yang mampu menghadapi krisis energi. Inggris, Perancis, Italia dan Jepang terpaksa mengadakan pinjaman uang untuk menjamin supply energi yang diperlukan.

¹Asia 1975 Year book - Far Eastern Economic Review Population: The People Plague, hal. 58 dst.

²Heinrich Bechtoldt - The Diktat of the Oil millions, Aussen Politik Vol. 25 No. 3/74. hal. 303 dst.

Negara-negara berkembang dapat dibagi dalam empat golongan. Negara-negara produsen minyak sejak tahun 1974 memang menerima banyak uang sebagai akibat melonjaknya harga-harga minyak bumi. Namun di antara negara-negara produsen minyak terdapat negara-negara dengan penduduk sedikit seperti Libya, Kuwait, Bahrain, Emir-emir di Teluk Persia dan Arab Saudi. Ada negara-negara produsen minyak dengan jumlah penduduk yang besar seperti Aljazair, Nigeria, Iran dan Indonesia. Golongan ketiga terdiri dari negara-negara yang tidak mempunyai sumber minyak, akan tetapi sebelumnya berhasil memelihara ekonomi yang relatif seimbang pada waktu sekarang, ekonominya tergoncang. Menurut angka-angka World Bank negara-negara yang paling peka ekonominya di dalam krisis energi adalah Bangladesh, Ethiopia, India, Kenya, Mali, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Tanzania dan Uganda. Diperkirakan bahwa untuk tahun 1974 negara-negara tadi harus membayar 10.000 juta dollar untuk mengimpor minyak bumi dan komoditi yang dibuat dari minyak. Jumlah uang tadi jauh lebih besar daripada jumlah bantuan ekonomi yang diberikan oleh negara-negara industri kepada negara-negara berkembang. Daftar negara-negara tadi, menunjukkan bahwa terkecuali Mali, semua negara lain terletak di kawasan Samudra Indonesia.

VI. Benih-benih Pertentangan di Sekitar Samudra Indonesia

Negara-negara berkembang di sekitar Samudra Indonesia, setelah menjadi merdeka, menghadapi persoalan-persoalan yang dapat atau yang sudah menimbulkan keretakan dan perpecahan dalam masyarakat masing-masing, yang akhirnya berkembang menjadi gerakan-gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah.

Burma, sejak menjadi merdeka sudah menghadapi gerilya dari golongan-golongan White Flag dan Red Flag Communist, dari suku Karen dan Shan. Di Thailand di perbatasan Utara terdapat golongan bersenjata yang bersandar pada Vietnam Utara dan Laos, coraknya kiri. Di perbatasan Selatan Thailand terdapat gerakan Komunis yang bermukim di Thailand, akan tetapi beroperasi di Malaysia, di samping itu ada gerakan Pattani, yang bercorak Islam, karena menentang supremasi elite Thai yang beragama Budha. Di Timur Tengah terdapat gerakan-gerakan Pembebasan Rakyat yang melawan pemerintah-pemerintah Sheik. Pada tahun 1974 meletus keadaan gawat dengan mula-mulanya menggulingkan Kaisar Haile Selassie,

lalu pemberontakan gerakan separatis di Eritrea, gerakan Islam yang tidak mau menerima supremasi elite yang terdiri dari suku Amhari, yang beragama Kristen-Kopt.

Semua contoh yang disebut merupakan peristiwa di beberapa negara yang menggambarkan bahwa ketidak-puasan satu golongan dapat menjadi gerakan bersenjata. Ketidak-puasan itu dapat didasarkan pada faktor-faktor ethnologis, suku melawan suku, ada pula religious, ada faktor daerah yang merasa dianak-tirikan oleh pusat, ada rasa cemburu karena satu daerah lebih maju dari daerah lain.

Di bagian Barat Samudra Indonesia terletak Afrika Selatan dan Rhodesia yang masih tetap melaksanakan politik apartheid yang dipandang sebagai ancaman oleh negara-negara tetangganya yang terdiri dari orang Afrika asli. Ketegangan ini mempengaruhi proses dekolonisasi Mozambique yang menurut rencana akan menjadi merdeka pada tahun 1975. Periode transisi di bawah pimpinan Frelimo belum tentu akan berjalan lancar.

Antara Kenya, Somalia terdapat sengketa perbatasan. Hubungan antara Tanzania dan Uganda terus memburuk.

Di semenanjung India terdapat pertentangan antara India, Pakistan dan Bangladesh, yang pernah memuncak menjadi peperangan.

Catatan Akhir

Setelah jajahan-jajahan di benua Asia dan di Afrika menjadi negara-negara merdeka, maka dalam gelanggang internasional timbul negara-negara baru sebagai anggota PBB, sebagai unsur-unsur merdeka yang ingin menentukan nasibnya masing-masing. Pada saat menjadi merdeka pemerintah-pemerintah negara baru, menghadapi tugas mulia dan berat untuk menyusun negaranya, baik dengan membangun struktur pemerintahan, alat kekuatan negara beserta kehidupan politik rakyat banyak. Tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat memerlukan pembinaan bidang ekonomi yang tadinya dikuasai sepenuhnya oleh bangsa asing. Perjuangan kemerdekaan untuk menghapuskan penjajahan berbeda dari satu negara dengan negara lain. Ada yang mengangkat senjata, seperti di Burma dan di Indonesia. Ada yang melakukan perjuangan kemerdekaan dengan mengadakan aksi di bidang politik seperti di India dan di Tanzania. Ciri-ciri perjuangan kemerdekaan memberikan arah kepada strategi nasional yang dirumuskan oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada waktu kemerdekaan diproklamasikan.

Pengertian mengenai strategi nasional adalah: ketrampilan dan pengetahuan mengenai mengembangkan dan mempergunakan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, psikologi dan kekuatan militer agar tercapai kemanfaatan maksimal untuk melaksanakan strategi nasional.

Sekarang 20 tahun sudah lampau. Kebanyakan pemimpin-pemimpin yang mengepalai negara-negara baru waktu menjadi merdeka sudah meninggal dunia atau sudah diganti dengan pemimpin-pemimpin lain. Charisma yang diperlukan oleh pemimpin-pemimpin waktu memimpin perjuangan kemerdekaan ternyata dalam memimpin pemerintah lebih memerlukan ketrampilan memerintah yang tidak didasarkan lagi atas semboyan-semboyan melainkan atas kemampuan membangun sesuai dengan syarat-syarat administrasi dan teknologi modern.

Pun pula penghidupan politik yang semula dilakukan sesuai dengan norma-norma demokrasi yang berlaku di Eropa Barat dan di Amerika Serikat, sekarang di kebanyakan negara di sekitar Samudra Indonesia sudah diganti dengan sistim pemerintahan yang lebih sesuai dengan kondisi negara-negara di sekitar Samudra.

Di bidang ekonomi negara-negara di sekitar Samudra masih tetap merupakan produsen komoditi-komoditi yang diperlukan oleh negara-negara industri yang terletak di sekitar Samudra Atlantik dan di sekitar Samudra Pasifik. Faktor minyak merupakan faktor strategis di seluruh dunia.

Hasil ekspor komoditi-komoditi tidak menghasilkan pendapatan yang memadai untuk melaksanakan strategi nasional. Melonjaknya harga minyak bumi menurunkan nilai terms of trade dari negara-negara berkembang. Bantuan yang diharapkan dari negara-negara industri juga memperlihatkan angka-angka menurun.

Faktor-faktor penghasil komoditi-komoditi, perlunya bantuan dari negara-negara industri, di samping itu timbulnya RRC sebagai kekuatan baru merupakan faktor-faktor untuk menentukan hubungan internasional di Samudra Indonesia.

Perlombaan maritim antara Amerika Serikat dan Soviet dalam memelihara kesatuan-kesatuan armadanya, ditambah dengan rencana Amerika Serikat untuk mendirikan Diego Garcia sebagai pangkalan maritim, yang harus dilihat dalam rangka Guam Doctrine A.S. yang kemudian ditantang dengan Brezhnev Doctrine dari Soviet merupakan lanjutan konfrontasi antara dua superpowers di samping perhatian superpowers tadi terhadap pengembangan kehadiran RRC di Samudra Indonesia. Perkembangan strategis militer ini dipandang

sebagai ancaman terhadap strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang di sekitar Samudra Indonesia.

Perseolan-perseolan mengenai ekspansi penduduk dan krisis pangan ternyata tidak mendapat penyelesaian, walaupun dibicarakan pada tingkat konferensi-konferensi internasional yang disponsori oleh PBB.

Interdependensi antara semua negara di dunia tidak memungkinkan terlaksananya satu politik dan strategi menyendiri. Hubungan internasional tetap diperlukan untuk stabilitas dunia. Penyelesaian mengenai problema-problema yang menghambat dan mengganggu pelaksanaan pembangunan harus dicari juga dalam kerjasama antara negara-negara di dunia.

Sejak kedatangan armada-armada Portugis sampai sekarang, hubungan internasional di Samudra Indonesia didominasi oleh usaha-usaha bangsa-bangsa dari luar Eropa untuk mendapatkan komoditi-komoditi yang diproduksikan di sekitar Samudra. Mulai dengan komoditi cengkeh, disusul dengan komoditi-komoditi hasil perkebunan-perkebunan besar, timbul sekarang komoditi minyak bumi yang menonjol sebagai bahan strategis.

Usaha untuk mendapatkan monopoli dalam memperoleh komoditi-komoditi di sekitar Samudra, telah menimbulkan pertempuran-pertempuran laut antara armada-armada asing, dan menghasilkan hegemoni dari negara asing di perairan Samudra Indonesia. Dalam rangka pemikiran tadi, dapat dimengerti bahwa penarikan unsur maritim Inggris pada tahun 1968 oleh negara-negara Barat dipandang sebagai kenyataan bahwa di Samudra Indonesia telah terdapat "vacuum", kekosongan. Perlombaan antara kesatuan-kesatuan armada-armada Soviet dan kesatuan armada Amerika selanjutnya diartikan sebagai proses mengisi kekosongan.

Pernah armada-armada Eropa dapat mempergunakan kelemahan-kelemahan di kerajaan di sekitar Samudra untuk mendapatkan posisi-posisi unggul di beberapa pelabuhan-pelabuhan. Perkembangan itu dapat dimungkinkan karena pada waktu itu Samudra Indonesia berada dalam transisi, terutama di Indonesia, yang ditandai oleh lenyapnya kerajaan-kerajaan dominan seperti Majapahit dan belum mantapnya kerajaan-kerajaan baru seperti Demak, Banten dan Aceh. Di Semenanjung India Dinasti Baber mulai menguasai Semenanjung, yang kemudian terkenal sebagai Mogul Empire dengan Raja-raja seperti Akhbar, Shah Jahan, Arungzeb, akan tetapi kerajaan jaya itu merupakan kerajaan kontinental, seperti di Indonesia kesultanan Mataram, dengan Sultan Agung.

Konfrontasi antara kekuasaan maritim yang diperkuat dengan infra-struktur pelabuhan-pelabuhan, yang kemudian menjadi benteng-benteng kekuasaan kontinental akhirnya berhasil dengan keunggulan maritim.

Sejak mencapai kemerdekaan, negara-negara di sekitar Samudra juga berada dalam masa transisi, antara masyarakat penjajahan menuju ke masyarakat merdeka yang dicita-citakan. Macam-macam cara pembangunan sudah dilaksanakan di negara-negara di sekitar Samudra. Pada umumnya pola pemikiran penjajah di bidang ekonomi ditolak karena tujuannya jelas hanya akan menguntungkan si penjajah. Pembangunan secara sosialis pun tidak membawa hasil. Sekarang terdapat kecenderungan untuk melaksanakan pembangunan, walaupun dengan bantuan negara-negara kaya, akan tetapi dengan pola-pola pemikiran yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

Indonesia dapat merasa bahagia, karena Strategi Nasional, yang dilengkapi dengan Doktrin Ketahanan Nasional mengembangkan teori, bahwa negara berkembang seperti Indonesia tidak akan mengikuti "power-politics" seperti dilaksanakan oleh negara-negara maju, akan tetapi akan mengembangkan faktor-faktor yang dimiliki bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan beserta faktor-faktor letaknya geografis, penduduk dan kekayaan alam secara integral untuk dapat melaksanakan pembangunan demi kepentingan bangsa dan negara.

Doktrin Ketahanan Nasional merupakan doktrin tepat untuk menghadapi masa transisi yang dihadapi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di sekitar Samudra Indonesia. Masa transisi ini penuh dengan aspek-aspek security, yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan masyarakat yang sedang berkembang, terutama dalam menghadapi eksplosif penduduk dan krisis pangan. Akan tetapi juga disebabkan karena penghasilan-penghasilan komoditi-komoditi belum memadai untuk kepentingan bangsa. Indonesia, misalnya juga menghasilkan minyak bumi, akan tetapi eksplosif penduduk menimbulkan problema-problema yang dapat menghambat pembangunan.

Hubungan Internasional tidak lagi dibatasi pada rangka diplomasi antara Departemen Luar Negeri beserta diplomat-diplomat dari satu negara dengan Departemen Luar Negeri dan diplomat-diplomat dari negara lain. Hubungan internasional dilakukan di segala tingkat, antara pemerintah dengan pemerintah,

antara badan-badan swasta dan organisasi-organisasi politik, di bidang riset dan tukar-menukar cendekiawan. Faktor baru sejak perang dunia II adalah Multi National Corporations dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat. Akumulasi modal dari Multi National Corporations sekarang mulai disaingi dengan akumulasi modal dari negara-negara produsen minyak di Timur Tengah. Kemampuan finansial negara-negara berkembang jauh kurang dari kemampuan-kemampuan finansial dari negara-negara maju dan korporasi-korporasi multi-nasional.

Aspek-aspek security sampai sekarang belum dapat diatasi, walaupun telah dibicarakan di forum-forum internasional di PBB dan lain-lain. Keadaan mendesak, karena krisis-krisis dunia ditambah dengan krisis penduduk dan krisis pangan diproyektir akan mempengaruhi kepekaan dan kelemahan konstelasi bangsa-bangsa di sekitar Samudra, dan ini dapat menimbulkan keretakan-keretakan dalam susunan masyarakat. Di beberapa negara keretakan sudah terjadi, yang bukan saja menghambat akan tetapi membahayakan pembangunan dan kelangsungan hidup bangsa, seperti terjadi di Pakistan.

Pernah di masa perjuangan pisik, Indonesia memiliki satu kebulatan tekad dari segenap bangsa dan dari semua golongan-golongan. Kebulatan tekad merupakan kesatuan pendapat untuk mencapai tujuan tertentu, pada waktu itu kemerdekaan bangsa. Kebulatan tekad merupakan kondisi mental, yang dimiliki bersama dan dipelihara karena ada lawan yang nyata -- yaitu pasukan-pasukan penjajah dan ada dasar-dasar pengertian bersama mengenai kemerdekaan, yang dilahirkan dalam masa perjuangan kemerdekaan sebelum peperangan Pasifik.

Sekarang dalam fase pembangunan sudah terdapat suasana lain. Suasana semboyan sekarang diganti dengan kepemimpinan bangsa yang ingin membangun. Rumusan-rumusan yang terdapat di Garis Besar Haluan Negara, Buku-buku Repelita I, II dan seterusnya, RAPENI-RAPENI dari tahun ke tahun yang dibicarakan di DPR, semua menggambarkan suasana pembangunan yang berlaku. Rekonstruksi pemerintah, alat-alat pemerintahan dan ABRI, beserta rekonstruksi kehidupan politik dalam wadah-wadah GOLKAR, PPP dan PDI menggambarkan bahwa pemerintah berusaha untuk menyusun infra-struktur dari pusat ke bawah.

Berlainan dengan fase gerilya, musuh yang dihadapi sekarang adalah kemiskinan, kenelaratan dan keterbelakangan masyarakat. Hal-hal yang nyata, tetapi tidak nyata seperti

pernah ada pasukan-pasukan musuh yang mendatangi desa-desa yang langsung mengancam kehidupan warga-warga desa.

Fase pembangunan sekarang, memerlukan juga kebulatan tekad untuk melaksanakan pembangunan. Proses pembangunan adalah proses yang memerlukan waktu lama. Kebulatan tekad tidak dapat dibangkitkan dengan pidato-pidato berapi-api seperti pernah terjadi waktu perjuangan kemerdekaan, kebulatan tekad tidak timbul spontan, akan tetapi harus dibangkitkan dalam rangka pelaksanaan integral dari segala segi kehidupan bangsa.

Seperti dalam strategi militer, terdapat rencana-rencana operasi yang merupakan integrasi dari semua unsur strategis, yang dalam pelaksanaan dengan jelas menentukan sasaran-sasaran, tetapi juga menentukan garis-garis antara, supaya dapat disusun kembali kekuatan-kekuatan operasional, maka strategi pembangunan secara integral memerlukan juga rencana-rencana operasional dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, melalui Gubernur, Bupati sampai ke Lurah-lurah. Yang perlu dipentingkan adalah garis-garis vertikal, antara pemerintah pusat ke bawah, akan tetapi lebih penting adalah garis-garis horizontal di tiap tingkat, yang memberikan wewenang dan kekuasaan penuh pada penguasa-penguasa bawahan.

Hanya dengan infra-struktur ketat, demi pelaksanaan operasi-operasi pembangunan, dapat tercapai dan terpelihara kebulatan tekad bangsa, yang merupakan syarat mutlak dalam fase pembangunan. Ide-ide kebulatan tekad di Indonesia dinamakan Ketahanan Nasional, di Malaysia - Rukun Negara, di Filipina Selfreliance.

Keadaan telah mendesak, mudah-mudahan ide-ide yang baik dapat dituangkan dalam rencana-rencana operasional yang jelas. Hal-hal ini pasti akan besar artinya untuk membina security di kawasan Samudra Indonesia.

